

KINERJA SEKTOR PERIKANAN PROVINSI BANTEN

Achmad Rizal

Laboratorium Manajemen Bisnis Perikanan,
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Padjadjaran
Gedung 4. FPIK UNPAD, Kampus Jatinangor, UBR 40600
Email : achmadrizal@unpad.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan sektor perikanan merupakan salah satu pembangunan sektoral yang memiliki kontribusi pada pembangunan di Provinsi Banten khususnya dalam pertumbuhan ekonomi regional dan penyerapan tenaga kerja. Makalah ini menganalisis hasil model LQ dan Tipologi Klassen atas sektor perikanan terhadap pembangunan wilayah Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki produksi perikanan potensial di Pulau Jawa. Sebagai salah satu sektor potensial, sektor perikanan perlu dukungan kebijakan agar mampu berkontribusi pada perekonomian wilayah Provinsi Banten. Hipotesis dari penelitian ini adalah sektor perikanan menjadi faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi daerah Banten. Pada kenyataannya, hasil analisis menunjukkan fakta sebaliknya, sektor perikanan bukan sektor dominan dalam pertumbuhan daerah Provinsi Banten.

Kata Kunci : sektor perikanan, model LQ, dan analisis tipologi kelas

ABSTRACT

Fishery development become one of sectoral development that will contribute on regional economic growth and reducing unemployment. In this paper, we present the result of LQ model and Klassen Typology Analysis to show the position of fishery sector toward regional economy of Banten Province. Banten Province has the potential fishery production in Java Island. As one of important sector, fishery, need policy support to enhance regional economy of Banten Province. Fishery sector has potential economic growth of Banten Province sector was the hypothetical of this research. Factually, the result of this research prove that fishery sector is not driving sector for regional economic growth in Banten Province.

Keywords : fishery sector, LQ model, and Klassen Typology analysis.

I. PENDAHULUAN

Pada era pasar global di abad-21 ini, setiap daerah dihadapkan pada berbagai tantangan sekaligus peluang dalam mewujudkan pembangunan ekonomi sekaligus mewujudkan masyarakat daerah yang adil dan makmur. Tantangan paling mendasar bagi setiap daerah adalah bagaimana meningkatkan

efisiensi serta daya saing perekonomiannya, dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih kompetitif baik di pasar domestik maupun global secara berkelanjutan.

Pada dekade terakhir, ada kecenderungan kebijakan hampir semua daerah mengutamakan pertumbuhan ekonomi

yang tinggi berupa perkembangan Pendapatan Domestik Regional bruto (PDRB) sebagai cerminan kinerja pembangunannya. Secara garis besar ada beberapa faktor yang dapat mendorong kinerja pembangunan suatu wilayah, yaitu *pertama*, potensi sumberdaya, yang meliputi sumberdaya alam (terutama potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan baik langsung dan tidak langsung serta ketersediaan stok) dan potensi sumberdaya manusia (angkatan kerja). *Kedua*, kondisi perekonomian, aspek ini sangat besar pengaruhnya bagi besar kecilnya investasi yang ditanamkan. Faktor ekonomi yang mempengaruhi adalah tingkat suku bunga, kontribusi sektor-sektor ekonomi, *demand* pasar, ketersediaan infrastruktur dan tingkat teknologi. *Ketiga*, kebijakan pemerintah, aspek ini berkaitan dengan peraturan yang diterapkan (Budiharsono, 1996).

Pembangunan perikanan merupakan salah satu pembangunan sektoral yang diharapkan mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja serta pembangunan nasional secara menyeluruh. Cukup beralasan bila sektor ini menjadi salah satu prioritas pembangunan, karena sektor perikanan didukung oleh dua komponen utama yang menjadi tulang punggung pengembangannya. *Pertama*, komponen bio-fisik, perairan Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan (potensi perikanan air tawar dan laut)

yang beragam jumlahnya, dan masing-masing sumberdaya tersebut memiliki nilai penting baik dari sisi pasar domestik maupun pasar internasional. *Kedua*, komponen sosial ekonomi, secara sosial, sebagian besar penduduk Indonesia (kurang lebih 60%) hidup di wilayah pesisir (dengan pertumbuhan rata-rata 2 % per tahun). Hal ini disebabkan secara administratif, sebagian besar kota (kota dan kabupaten) terletak di kawasan pesisir. Implikasi dari sisi ekonomi, industri kelautan (termasuk perikanan) menjadi andalan sektoral dengan menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja secara langsung (PKSPL 2002).

Dua komponen penting tersebut setidaknya memberi sinyal bahwa sektor perikanan akan mampu memenuhi harapan untuk menjadi salah satu kontributor utama pendapatan daerah dan negara serta penyerapan tenaga kerja. Adanya momentum otonomi daerah dalam konteks pembangunan perikanan, terlepas dari besarnya sisi positif yang dapat diambil bagi kepentingan daerah, tetapi juga menimbulkan problematika baru, yaitu bagaimana mengembangkan sistem pengembangan perikanan yang efektif untuk dapat mendorong pembangunan daerah. Dalam kerangka makro itulah, makalah ini menggunakan model LQ dan Tipologi Klassen atas sektor perikanan terhadap pembangunan wilayah Provinsi Banten.

II. DATA DAN PENDEKATAN

2.1. Metode Pendekatan Kajian

Kajian Kinerja Sektor Perikanan di Provinsi Banten dilakukan melalui berbagai pendekatan yang mencakup aspek sektoral, dan aspek regional.

2.2. Metode Analisis

Analisis yang digunakan adalah analisis regional, aspek-aspek pertumbuhan sektoral di Provinsi Banten dibandingkan dengan potensi sektoral yang lebih luas (nasional). Analisa kegiatan regional bertujuan untuk mengetahui potensi perkembangan kegiatan wilayah dan melihat potensi kondisi suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya sehingga dapat membantu menghasilkan perkembangan kawasan perencanaan secara optimum. Dua jenis teknik analisis regional yang digunakan adalah:

2.3. Analisis Location Quotient (LQ)

Metode LQ ini dipergunakan untuk melihat dominasi dan peran suatu kegiatan dalam lingkup luas wilayah tertentu (Mudrajat, 2002).

$$L_{qi} = \frac{S_i/N_i}{S/N} = \frac{S_i/S}{N_i/N}$$

keterangan :

S_i = besaran dari suatu kegiatan tertentu yang akan diukur di kawasan perencanaan

N_i = besaran total untuk kegiatan tertentu dalam daerah yang lebih luas

S = besaran total untuk seluruh kegiatan di kawasan perencanaan

N = besaran total untuk seluruh kegiatan di daerah yang lebih luas

Untuk dapat menginterpretasikan hasil analisis LQ, terdapat suatu kesepakatan sebagai berikut :

- Jika nilai $LQ > 1$, maka hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi suatu aktivitas di sub wilayah ke-i secara relatif dibandingkan dengan total wilayah atau terjadi pemusatan aktivitas di sub wilayah ke-i.
- Jika nilai $LQ = 1$, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa aktivitas setara dengan pangsa total.
- Jika nilai $LQ < 1$, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas yang secara umum ditemukan diseluruh wilayah.

2.4. Analisis Tipologi Klasen

Analisis Tipologi Klasen Sektoral (Arsyad, 2006 dan Mudrajat, 2002) terdapat 4 (empat) kategori sektoral yang di bagi atas 4 kuadran:

Kuadran pertama (KW 1) adalah sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat. Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan nasional (g_n) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (s_i) yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sektor tersebut secara nasional (s_n). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i > g_n$ dan $s_i > s_n$. Sektor dalam kuadran 1 dapat pula diartikan sebagai sektor yang

potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi (pangsa) yang lebih besar dibanding dengan nasional.

Kuadran kedua (KW II) adalah sektor maju tapi tertekan. Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sektor tersebut secara nasional (gn), tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah (si) yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap nasional (sn). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $gi < gn$ dan $si > sn$. Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh.

Kuadran ke tiga (KW III) adalah sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih tinggi dari sektor tersebut secara nasional (gn), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (si) lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap skala nasional (sn). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $gi > gn$ dan $si < sn$. Sektor dalam kuadran III ini dapat diartikan sebagai sektor yang sedang *booming*. Meskipun kontribusi (pangsa) pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional.

Kuadran keempat (KW IV) ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah dibandingkan

dengan pertumbuhan nasional (gn) dan sekaligus memiliki kontribusi terhadap PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap nasional (sn).

2.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam Kajian Kinerja Sektor Perikanan di Provinsi Banten, data dihimpun sepenuhnya dengan cara melakukan studi yang komprehensif terhadap bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku (*textbook*), jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya. Dengan demikian, dalam konteks ini metode penelitian yang digunakan dapat digolongkan sebagai Metode *Literature Survey* (Barbier, *et.al.*, 1997). Segenap data yang telah dikumpulkan baik melalui survei kepustakaan (*literature survey*) di atas kemudian dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Potensi Kelautan dan Perikanan

3.1.1. Potensi Perikanan

Provinsi Banten lahir melalui Undang-Undang No.23 tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000. Banten merupakan wilayah yang sangat strategis mengingat letak daerahnya berbatasan dengan Ibu Kota Negara dan juga sebagai jembatan gerbang antara Jawa dan Sumatera. Dengan luas wilayah 8.800,83 Km² dan garis pantai 517,42 km, Banten memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar.

Potensi sumberdaya perikanan tangkap di Banten saat ini baru dimanfaatkan 117.170 ton/tahun (Data Tahun 2010) sedangkan potensi lestari di perairan Laut Jawa sebesar 847.500 ton dan Samudera Hindia sebesar 656.000 ton.

Lahan yang baru dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan budidaya sebesar 33.756,76 ha dari luas areal 153.412,560 ha (22,00%). Didukung dengan sarana dua buah Pelabuhan Perikanan di Karangantu, Serang (Pantai Utara Jawa) dan Binuangeun, Lebak (Pantai Selatan Jawa) dengan 32 PPI dan TPI yang tersebar di empat kabupaten dan satu kota. Semua ini tentunya memerlukan dukungan para investor untuk dapat mengembangkan potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Banten.

Usaha perikanan di Provinsi Banten meliputi jenis perikanan tangkap (laut dan perairan umum) serta perikanan budidaya (laut, tambak, kolam, sawah, keramba jaring terapung). Produksi perikanan hingga tahun 2009 mencapai 76.324,05 Ton dengan nilai Rp. 538.130 Juta (merupakan penurunan dari produksi 87.279,40 Ton dengan nilai produksi Rp. 588.101 Juta pada tahun 2008). Penurunan produksi perikanan terutama dipengaruhi penurunan produksi perikanan tangkap yang mencapai 17,65% dalam kurun waktu 2008-2009, sedangkan penurunan produksi perikanan budidaya hanya sebesar 2,95%. Perikanan tangkap berkontribusi terhadap

produksi sebesar 70,98% dan nilai produksi sebesar 54,24%, sedangkan perikanan budidaya berkontribusi terhadap produksi sebesar 29,02% dan nilai produksi sebesar Rp. 45,76%.

Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut Provinsi Banten tersebar di Laut Jawa, Selat Sunda dan Samudera Hindia, atau pada wilayah perairan Provinsi Banten yang seluas 11.134,224 km² (belum termasuk perairan nusantara/ teritorial dan zona ekonomi eksklusif indonesia/ZEEI), namun pengembangan penangkapan ikan saat ini masih terkonsentrasi di Laut Jawa dan Selat Sunda. Disisi lain, dalam Rencana Tata Ruang Kelautan Nasional (RTRKN, DKP 2003) pengembangan penangkapan ikan di Laut Jawa sudah harus dibatasi terkait dengan kecenderungan *over fishing*. Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut sendiri masih berpeluang besar untuk dikembangkan, hal ini setidaknya tercermin dari produksi tahun 2009 yang sebesar 58.753,11 Ton baru memanfaatkan 76,98% dari potensi lestari di wilayah perairan Kab. Pandeglang (92.971 Ton), sehingga belum memperhitungkan potensi lestari wilayah perairan lainnya.

Produktivitas usaha perikanan budidaya masih perlu ditingkatkan, antara lain tercermin dari kondisi pada tahun 2009 dimana produktivitas budidaya tambak baru mencapai 0,87 Ton/Ha dan budidaya ikan di sawah mencapai 0,72 Ton/Ha. Disamping itu

produksi budidaya laut baru berkontribusi 12,91% terhadap produksi perikanan budidaya atau 3,74% terhadap produksi perikanan keseluruhan. Potensi sumber daya perikanan budidaya juga masih berpeluang besar untuk dikembangkan, seperti budidaya laut (KJA dan rumput laut) di pantai utara dan pantai barat, lahan tambak hingga tahun 2009 baru dimanfaatkan sekitar 79,7 % (10..970,70 Ha) dari potensi 13.768,9 Ha, lahan sawah yang dimanfaatkan untuk budidaya perikanan baru sekitar 6,18% (5.209,22 Ha) dari 84.315,40 Ha, ketersediaan lahan yang masih memadai untuk pengembangan kolam budidaya ikan yang baru memanfaatkan 1.280,76 Ha, serta keberadaan perairan umum (sungai, waduk, situ) untuk pengembangan budidaya keramba.

Berdasarkan jumlahnya, armada perikanan tangkap mengalami penurunan dari 5.129 unit (tahun 2008) menjadi 4.804 unit hingga tahun 2009. Dalam usaha penangkapan ikan hingga tahun 2009 didominasi oleh penggunaan armada Perahu Motor Tempel (65,24%) dan Kapal Motor hingga 20 GT (23,36%), hal ini menunjukkan kapasitas usaha penangkapan ikan masih rendah dan berorientasi pada wilayah perairan pantai (hingga 12 Mil). Di samping itu, dengan melihat zona penangkapan ikan yang dapat dimanfaatkan (perairan pantai hingga ZEEI), belum didukung dengan keberadaan pelabuhan perikanan yang memiliki kapasitas pelayanan yang setara dengan potensi wilayah perairan.

Bila mengacu pada standar konsumsi ikan per kapita (FAO), jumlah produksi ikan di Provinsi Banten belum mampu memenuhi kebutuhan lokal terhadap pangan yang berasal dari protein ikan, dimana dengan jumlah produksi sebesar 86.531,14 Ton (2009) dan jumlah penduduk 9.083.144 Jiwa hanya mencapai 9,2 Kg/Kapita/Tahun (32,82%) dari yang sekurangnya 29 Kg/Kapita/Tahun. Meskipun belum terpenuhinya kebutuhan lokal, produk perikanan Provinsi Banten sudah merambah pasar luar negeri meskipun masih terbatas, dimana komoditi Udang Beku pada tahun 2008 di ekspor melalui 3 perusahaan cold storage dengan kapasitas produksi 280 Ton/Tahun dan dengan negara tujuan Jepang dan USA.

Dengan memperkirakan nilai PDRB ADHB Sub Sektor Perikanan hingga tahun 2009 yang sebesar Rp. 495,52 Milyar, serta jumlah Masyarakat Perikanan yang sebesar 158.673 jiwa, maka pendapatan per kapita masyarakat perikanan hingga tahun 2010 masih dalam tingkat yang memprihatinkan, yaitu hanya berkisar Rp. 3.122.930/tahun atau Rp. 260.244/bulan. Selanjutnya, sebagian besar kelompok masyarakat ini termasuk golongan miskin dengan pola usaha yang masih tradisional dan bersifat subsisten. Minimnya akses terhadap informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat petani/nelayan tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi. Bahkan, dalam tahun-tahun terakhir kenaikan BBM

yang menaikkan ongkos produksi telah mengurangi intensitas nelayan untuk melaut.

3.1.2. Potensi Wisata Bahari

Secara kewilayahan, pola pengembangan pariwisata Provinsi Banten terdiri dari Kawasan Wisata Pantai Barat, Kawasan Wisata Pantai Selatan dan Kawasan Wisata Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten (Diparsenibud 2010) telah ditetapkan 18 kawasan pengembangan pariwisata yang tersebar di seluruh kabupaten/kota berdasarkan hasil pengelompokan (*clustering*) obyek-obyek wisata yang ada.

Dari 18 kawasan pengembangan pariwisata yang ditetapkan tersebut, sebagian telah bertumbuh kembang menjadi obyek wisata nasional maupun internasional, seperti Kawasan Pantai Anyer – Carita - Tanjung Lesung, dan TNUK. Namun bertumbuhkembangnya kawasan wisata secara umum masih terkonsentrasi pada wilayah utara dan barat Provinsi Banten. Sedangkan kawasan-kawasan pengembangan wisata di wilayah selatan belum bertumbuhkembang terutama disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur (transportasi dan akomodasi wisata). Meskipun kinerja pariwisata daerah melalui indikator laju pertumbuhan tamu nusantara dan tamu mancanegara pada hotel bintang dan non bintang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2007-2010 masing-masing 40,84% dan 40,25% per tahun,

namun rata-rata lama menginap tamu mancanegara menunjukkan kecenderungan stagnan, yaitu dari 4,96 hari (2007), 4,99 hari (2008) dan 4,12 hari (2009) dan 2,98 hari (2010).

Di sisi lain, proporsi kunjungan tamu nusantara dan mancanegara pada hotel bintang dan non bintang di wilayah selatan (Kabupaten Pandeglang dan Lebak) hingga tahun 2010 masing-masing hanya sebesar 23,84% dan 11,47% (RPJM Prov. Banten Tahun 2007 – 2012).

3.2. Kondisi Perekonomian Sektoral dan Profil Sektor Perikanan Provinsi Banten

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) merefleksikan besaran nilai tambah bruto yang tercipta sebagai akibat proses produksi barang dan jasa oleh sektor produktif dalam perekonomian suatu daerah tanpa melihat pelaku ekonominya. Pelaku ekonomi biasanya berasal dari daerah tersebut dan atau dari luar daerah tersebut.

PRDB Provinsi Banten disajikan atas dasar harga beralaku dan atas dasar harga konstan 2000. Hal itu dimaksudkan agar perkembangan PDRB dapat ditelaah sebelum atau sesudah perhitungan pengaruh harga. Kajian PDRB atas dasar harga konstan lebih mencerminkan kenaikan produksi (*output*) secara nyata dan tidak dipengaruhi atas perubahan harga, diman pada umumnya faktor harga cenderung naik setiap tahunnya.

Besaran nilai PDRB diperoleh melalui pengukuran nilai tambah yang berasal dari

berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu daerah. Nilai PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki menjadi suatu

proses produksi. Nilai yang dihasilkan tersebut sangat tergantung pada potensi sumber daya dan faktor produksi (Tabel 1).

Tabel 1. PDRB Banten Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Tahun 2009-2010 (Milyar Rupiah)

Atas Dasar Harga	2009	2010
Berlaku	84.622,29	97.867,27
Konstan 2000	58.106,95	61.317,51

Sumber: Bappeda Provinsi Banten, 2011

Proses pertumbuhan (*growth*) perekonomian Provinsi Banten yang terus berjalan sedikit demi sedikit telah mampu membangkitkan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari PDRB Provinsi Banten 2010, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan yang menunjukkan *trend* meningkat. Jika PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 sebesar 84.622,29 miliar rupiah, maka pada tahun 2010 meningkat menjadi 97.867,27 miliar rupiah. Begitu pula PDRB atas dasar harga konstan 2000 meningkat dari 58.106,95 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi 61.317,51 miliar rupiah pada tahun 2010.

Kelompok sektor sekunder (sektor 3-5) sepanjang tahun 2010 masih merupakan sektor yang menciptakan nilai tambah terbesar. Hal itu sangat wajar mengingat sektor industri merupakan sektor unggulan yang memberi andil hampir 50% terhadap total penciptaan

nilai tambah bruto (NTB) di Banten pada 2010. Pada kelompok sektor sekunder, penciptaan NTB atas dasar harga berlaku meningkat 14,6 % dari 48.524,44 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi sebesar 55.608,19 miliar rupiah pada tahun 2010.

Pada kelompok sektor tersier (sektor 6-9), total NTB atas dasar harga berlaku yang tercipta meningkat 20,04 % dari 28.790,35 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi 34.558,58 miliar rupiah pada tahun 2010. Demikian pula dengan kelompok sektor primer (sektor 1-2), dimana total NTB atas dasar harga berlaku yang tercipta meningkat 5,38 % dari 7.307,49 miliar rupiah menjadi 7.700,50 miliar rupiah untuk periode yang sama.

Sektor perekonomian Banten selama ini didominasi oleh sektor manufaktur, dengan industri sebagai andalan. Pada tahun 2010 peranan sektor ini terhadap total pembentukan nilai tambah di Banten mencapai 56,82 persen.

Sektor jasa-jasa memberikan peranan terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 35,31 persen. Kecenderungan peranan sektor-sektor yang berbasis jasa, meningkat tiap tahun seiring dengan membaiknya perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat Banten terutama masyarakat di daerah Banten Selatan, peranannya tiap tahun semakin menurun.

Rendahnya nilai tambah yang tercipta sehingga pertumbuhannya tidak sepesat sektor lain, menyebabkan peranan sektor ini terhadap pembentukan PDRB Banten terus menurun. Pada tahun 2010 peranan sektor ini terhadap pembentukan PDRB Provinsi Banten sebesar 7,87 persen (Tabel 2).

Tabel 2. Peranan Sektoral Terhadap Pembentukan PDRB Banten Tahun 2009-2010 (%)

Sektor	2009	2010
1. Sektor Primer (<i>Agriculture</i>)	8,64	7,87
2. Sektor Sekunder	57,34	56,82
3. Sektor Tersier (<i>Service</i>)	34,02	35,31
PDRB	100	100

Sumber: Bappeda Provinsi Banten, 2011

3.3. Peranan Perikanan dan Kelautan Pada Ekonomi Wilayah Provinsi Banten

Data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di Provinsi Banten. Berdasarkan data PDRB, maka dapat ditentukan sektor unggulan (*leading sector*) di wilayah Provinsi Banten. Sektor unggulan adalah satu grup sektor/sub sektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan

prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.

Berdasarkan data PDRB Provinsi Banten tahun 2005-2010 harga berlaku, sektor perikanan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 9,9 % dalam 5 tahun terakhir (Tabel 3). pertumbuhan sektoral perikanan tersebut menempatkan sektor perikanan pada urutan ke 2 tertinggi dalam hal laju pertumbuhan sektoral di dalam Sektor Pertanian, setelah sektor Perkebunan (11,8 %).

Tabel 3. Nilai PDRB Sektorial Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Banten
Tahun 2005 – 2010

N o	Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	4,928,251	5,501,687	5,995,811	6,530,642	7,219,036	7,604,854
	Tanaman bahan makanan	3,259,946	3,590,632	3,955,447	4,320,379	4,837,981	4,948,788
	Tanaman perkebunan	71,667	440,048	446,121	452,048	485,753	633,613
	Peternakan dan hasilnya	890,035	1,005,123	1,093,135	1,221,241	1,316,759	1,372,601
	Kehutanan	30,925	35,283	37,590	41,450	48,309	48,688
	Perikanan	375,678	430,602	463,518	495,524	530,234	601,164
2	Pertambangan dan Penggalian	57,731	64,991	72,122	79,474	88,457	95,649
3	Industri Pengolahan	27,491,202	31,435,670	33,800,078	36,972,197	42,098,680	48,642,337
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,965,219	2,835,177	3,395,880	3,737,228	4,119,407	4,137,474
5	Bangunan	1,288,222	1,484,436	1,644,567	1,898,331	2,306,354	2,828,381
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,136,403	10,432,756	11,495,675	12,605,814	14,499,931	17,081,608
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3,932,326	4,687,484	5,181,598	5,889,082	7,257,845	9,182,131
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	767,603	1,016,310	1,750,259	2,329,052	2,782,823	3,278,936
9	Jasa-Jasa	2,403,424	2,888,647	3,239,307	3,671,964	4,249,754	5,015,905
	PDRB	51,970,381	60,347,159	66,575,297	73,713,784	84,622,288	97,867,273

Sumber: Bappeda Provinsi Banten, 2011.

Manfaat mengetahui sektor unggulan yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja

yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Sektor unggulan yang diukur dengan analisis *Location Quotient* (LQ) memiliki kesamaan dengan sektor ekonomi basis yang pertumbuhannya menentukan pembangunan

menyeluruh di Provinsi Banten. Adapun data yang digunakan adalah data PDB Indonesia 2007-2010, PDRB 2007-2010 Provinsi Banten, dan PDRB 2007-2010 per kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Berdasarkan Tabel 3-4, sektor perikanan bukanlah termasuk kategori sektor

basis (nilai $LQ < 1$). Sektor Basis (nilai $LQ > 1$) dalam struktur perekonomian Provinsi Banten adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Tabel 4. Nilai *Location Quotient* (LQ) Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Banten Tahun 2007 – 2010

No	Sektor	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	0.6	0.6	0.7	0.6
	Tanaman bahan makanan	0.8	0.8	0.9	0.8
	Tanaman perkebunan	0.3	0.3	0.3	0.3
	Peternakan dan hasil-hasilnya	0.9	0.9	1.0	0.9
	Kehutanan	0.1	0.1	0.1	0.1
	Perikanan	0.3	0.3	0.3	0.3
2	Pertambangan dan Penggalian	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Industri Pengolahan	1.8	1.8	1.8	1.8
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	5.4	4.9	5.1	4.6
5	Bangunan	0.4	0.4	0.4	0.4
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.0	1.1	1.1	1.2
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.3	1.3	1.3	1.4
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.3	0.4	0.4	0.4
9	Jasa-Jasa	0.5	0.5	0.5	0.5

Sumber: Hasil Olahan

Jika sektor memiliki nilai $LQ > 1$ maka barang/jasa-i produksi sektor tersebut merupakan barang/jasa basis (yang dapat diekspor, sehingga potensial untuk diunggulkan) bagi kawasan tersebut. Sebaliknya bila $LQ < 1$ maka barang/jasa-i hasil sektor tersebut disebut non-basis, yang produksinya hanya untuk kebutuhan lokal wilayah. sektor perikanan, dalam trend indeks

LQ dalam 4 tahun terakhir masih belum bergerak dari posisi sektor nonbasis.

Hasil Hitungan indeks LQ di atas, perlu didukung oleh analisis lain, dalam hal ini, penggunaan analisis tipologi klasen agar hasilnya lebih akurat. Berdasarkan Analisis Tipologi Klasen Sektoral (Arsyad, 2006 dan Mudrajat, 2002) terdapat 4 (empat) kategori sektoral yang di bagi atas 4 kuadran (Tabel 5)

:

Tabel 5. Komparasi Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Banten dan Nasional Atas Dasar Harga Berlaku menurut Sektoral Tahun 2007 – 2010

Sektoral	PDRB Banten		PDB Nasional	
	Rata-Rata Kontribusi (si)	Rata-rata Pertumbuhan (gi)	Rata-Rata Kontribusi (sn)	Rata-rata Pertumbuhan (gn)
Pertanian	0,090	0,091	0,139	0,122
Tanaman bahan makanan	0,059	0,088	0,070	0,108
Tanaman perkebunan	0,007	0,118	0,021	0,103
Peternakan dan hasil-hasilnya	0,016	0,091	0,017	0,112
Kehutanan	0,001	0,096	0,009	0,181
Perikanan	0,007	0,099	0,022	0,170
Pertambangan dan Penggalian	0,001	0,106	0,097	0,292
Industri Pengolahan	0,511	0,121	0,280	0,181
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,047	0,170	0,010	0,168
Bangunan	0,025	0,171	0,068	0,258
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,173	0,134	0,158	0,140
Pengangkutan dan Komunikasi	0,079	0,186	0,064	0,248
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,024	0,350	0,084	0,160
Jasa-Jasa	0,049	0,159	0,101	0,194

Sumber: Hasil Olahan berdasarkan PDRB Provinsi Banten dan Nasional

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, Sektor Perikanan termasuk kategori Sektor relatif tertinggal, karena rata-rata nilai pertumbuhan (g) dan rata kontribusi (s) di bawah rata-rata nasional.

Secara umum, berdasarkan hasil analisis model LQ dan Tipologi Klassen, Sektor Perikanan di Provinsi Banten, termasuk kategori Sektor relatif tertinggal. Sektor perikanan bukanlah termasuk kategori sektor basis (nilai $LQ < 1$). Sektor Basis (nilai $LQ > 1$) dalam struktur perekonomian Provinsi Banten adalah Sektor Industri Pengolahan,

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Hasil ini merupakan masukan penting bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk memikirkan solusi kebijakan bagi peningkatan dan percepatan sektor perikanan di masa datang (Tabel 6).

Tabel 6. Tipologi Klassen sektor-sektor di Provinsi Banten

Kuadran I Sektor maju dan tumbuh dengan pesat ($g_i > g_n$, $s_i > s_n$) Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	Kuadran II Sektor maju tapi tertekan ($g_i < g_n$, $s_i > s_n$) Sektor Industri Pengolahan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Kuadran III Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat ($g_i > g$, $s_i < s_n$) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Kuadran IV Sektor relatif tertinggal ($g_i < g_n$, $s_i < s_n$) Sektor Pertanian: sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor Bangunan Sektor Jasa-Jasa

Sumber: Hasil Olahan

IV. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang merupakan temuan dari kajian ini adalah :

1. Tampilan angka statistik data PDRB Provinsi Banten berdasarkan harga berlaku, sektor perikanan memiliki rata-rata pertumbuhan cukup menjanjikan yaitu sebesar 9,9 % dalam 5 tahun terakhir (2005-2010). Ironisnya, walaupun pencapaian pertumbuhan sektoral perikanan tersebut menempatkan sektor perikanan pada urutan ke 2 tertinggi setelah sektor Perkebunan, dalam hal laju pertumbuhan sektoral di dalam Sektor Pertanian, kinerja sektor Perikanan belum menjadi sektor penggerak perekonomian daerah Provinsi Banten. Faktanya, dengan

menggunakan alat analisis LQ dan tipologi klassen, menunjukkan fakta yang tidak menggembirakan yaitu: sektor perikanan bukan sektor basis dalam pertumbuhan daerah Provinsi Banten.

2. Sektor perikanan, seperti halnya sektor-sektor lain yang ada di sektor Pertanian, bukanlah sektor basis dan sektor potensial bagi pertumbuhan ekonomi daerah Banten ke depan.
3. Dugaan kurang berperannya sektor perikanan dalam kajian ini dengan menggunakan 2 (dua) alat analisis, yaitu: LQ dan tipologi klassen masih harus didukung oleh penelitian lain yang lebih mendalam dengan menggunakan alat analisis lain.

4.2. Saran

Penulis menyarankan perlu penelitian serupa dengan metode penelitian yang lain dengan data yang lebih akurat untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dari kondisi sektor perikanan dan perekonomian daerah Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2006. Ekonomi Pembangunan (Edisi 5). Penerbit: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Badan Perencana Daerah (Bapeda) Provinsi Banten, 2011. Provinsi Banten Dalam Angka 2011.
- Budiharsono, S. 1996. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bogor: Fakultas Pascasarjana IPB.
- Budiharsono, S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting, M.J. Sitepu, 1996. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2011. Kawasan Komoditas Unggulan Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
- Helldin, A. 2007. Regional Determinant of Foreign Direct Investment. University of Uppsala. Swedia. Thesis. www.scirus.com. (diakses Bulan Agustus 2012).
- Hirschman, AO. 1958. The Strategy of Economic Growth. Yale. New Haven.
- Kay, R., and J. Alder, 1999. *Coastal Planning and Management*. E & FN SPON. London and New York.
- Kuncoro, Mudrajat, 2002, Ekonomi Pembangunan: Teori dan Aplikasi, BPFE Yogyakarta.
- Myrdal, Gunnar. 1968. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. London. Allen Lane.
- Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) - IPB, 2002. Strategi Dasar Pembangunan Kelautan di Indonesia. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-dan P3O-LIPI. Bogor.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
- UNESCO, 1993. Coasts : Managing Complex Systems. Economics Development. Briefs. No. 6.
- United Nation. 2001. Economics and Social Commision for Asia and The Pacific. Reducing Disparitas: Balance Development of Urban and Rural Areas and Region Within the Countries of Asia and The Pacific. New York. Page 8.
- WCED, 1987. Our Common Future. Oxford University Press, New York.
- Williamson, JG. 1965. Regional Inequality and The Process National Development: Description of the Patterns, Chicago University. USA.